

**AUDIT MANAJEMEN ATAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS)  
DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KEDUNG JAYA  
DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:  
**ZIDNI MAGHFIROTUL ANAM**  
13812142019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zidni Maghfirrotul Anam

NIM : 13812142019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : AUDIT MANAJEMEN ATAS PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS)

DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KEDUNG

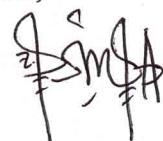
JAYA DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG

KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir Skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan yang tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Januari 2015  
Penulis,



Zidni Maghfirrotul Anam  
NIM. 13812142019

## **PERSETUJUAN**

### **AUDIT MANAJEMEN ATAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS) DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KEDUNG JAYA DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

## **SKRIPSI**

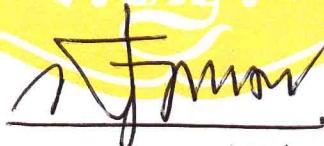
**Oleh:**  
**ZIDNI MAGHFIROTUL ANAM**  
**13812142019**

Telah disetujui dan disahkan  
Pada Tanggal Januari 2015

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,

Dosen Pembimbing



Abdullah Taman, S.E.,Ak.,M.Si  
NIP. 19630624 199001 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**AUDIT MANAJEMEN ATAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS)  
DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KEDUNG JAYA  
DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

Yang disusun oleh:

ZIDNI MAGHFIROTUL ANAM  
13812142019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Januari 2015 dan  
dinyatakan lulus.

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Dra. Sumarsih, M.Pd.	Ketua Penguji		23/1/2015
Ngadirin Setiawan, M. S.	Penguji Utama		23/1/2015
Abdullah Taman, SE. Akt., M.Si.	Sekretaris Penguji		23/1/2015

Yogyakarta, 26 Januari 2015  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.  
NIP. 19550328 198303 1 002

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya di balik kesulitan terdapat kemudahan”

(QS. Al- Insyirah: 5)

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain)”

(QS. Al- Insyirah: 7)

“Bahwa segala sesuatu yang terkadang membebani kita itu semata-mata adalah  
ujian dari Allah SWT untuk meningkatkan derajat kita, maka bersabarlah”

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda M. Muchozin dan Ibunda Supirah, terima kasih atas segalah curahan doa dan kasih sayang, serta dukungan nasihat-nasihat yang tidak pernah berhenti.
2. Keluarga besar, saudara-saudara saya, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya.

## **BINGKISAN**

1. Adikku tercinta Ibnu Miftakhul Azis, terima kasih atas doa dan dukungannya.

**AUDIT MANAJEMEN ATAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS)  
DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KEDUNG JAYA  
DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

Oleh:

Zidni Maghfirotul Anam

13812142019

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis tentang efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

Subjek penelitian ini adalah organisasi pelaksana kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan BKM yang beralokasi di Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen sedangkan objek penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan PJM Pronangkis di BKM Kedung Jaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu teknis analisis data dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data non angka yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk penilaian efektivitas pelaksanaan program BKM berdasarkan hasil perbandingan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan efek.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adalah (1) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang ada di BKM Kedung Jaya terdiri dari komponen lingkungan, komponen sosial, dan komponen ekonomi, (2) pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan BKM Kedung Jaya secara umum sudah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Kedungpuji (3) pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari tim pengelola yang ditunjuk oleh BKM untuk terjun langsung ke lapangan Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka rekomendasi yang diberikan adalah (1) sebelum membuat perencanaan program penanggulangan kemiskinan, sebaiknya BKM Kedung Jaya melakukan survei terlebih dahulu agar program yang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat berjalan dengan efektif, (2) organisasi harus merencanakan dana yang diperoleh dengan sebaik mungkin agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan, (3) dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, organisasi seharusnya mempersiapkan alternatif lain jika rencana pertama yang disusun tidak dapat terlaksana.

Kata kunci: Audit Manajemen, Program Penanggulangan Kemiskinan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “AUDIT MANAJEMEN ATAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS) DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KEDUNG JAYA DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir.
3. Abdullah Taman, S.E.,Ak.,M.Si., dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Ngadirin Setiawan, M.S., dosen narasumber yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
5. Dra. Sumarsih, M.Pd., yang bersedia menjadi ketua penguji dan memmberikan masukan-masukan yang bermanfaat.

6. Bapak Munarsis, ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya yang telah memberikan ijin penelitian di Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua amal baik mereka diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amalan yang terbaik, Amin. Harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 07 Januari 2015

Penulis,



Zidni Maghfirotul Anam

NIM. 13812142019

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Identifikasi Masalah .....	4
C.    Pembatasan Masalah .....	4
D.    Rumusan Masalah .....	5
E.    Tujuan Penelitian.....	5
F.    Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A.    Kajian Teori.....	7
1.    Audit.....	7
2.    Audit Manajemen.....	9

3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).....	15
B. Penelitian Relevan.....	22
C. Kerangka Berpikir .....	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
B. Desain Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
D. Variabel Penelitian .....	30
E. Definisi Operasional Variabel.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Instrumen Penelitian.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Hasil Audit Pendahuluan.....	38
2. Hasil Survei Pendahuluan.....	47
3. <i>Review</i> dan Pengujian Pengendalian Manajemen.....	49
B. Analisis Data tentang Efektivitas Audit Manajemen Atas Program Penanggulangan Kemiskinan .....	49
1. Analisis tentang Efektivitas.....	49
2. Rekomendasi.....	65
C. Pembahasan.....	66

<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>69</b>
A.    Kesimpulan.....	69
B.    Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Kisi-Kisi Instrumen Audit Manajemen.....	33

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	27
2. Struktur Organisasi BKM Kedung Jaya.....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks saat ini membutuhkan campur tangan dari semua pihak secara bersama-sama dan terorganisir. Namun terkadang penanganan kemiskinan selama ini masih belum terlaksana secara maksimal dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal, untuk itu diperlukan perubahan yang sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam masyarakat pastinya diperlukan suatu lembaga yang mampu menjadi wadah bagi setiap kegiatan untuk pemberantasan kemiskinan salah satunya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri baik PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. BKM didirikan sebagai pelaksana dari PNPM Mandiri untuk lebih memudahkan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan terutama yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulan kemiskinan.

Program yang ada di BKM merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang ekonomi berupa dana bergulir bagi kelompok yang ingin mendirikan kegiatan usaha, bidang sosial-produktif berupa pelatihan-pelatihan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, dan bidang infrastruktur desa. Ketiga program ini merupakan pemetaan swadaya di masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam program kerja BKM, seluruh masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan di desanya, sampai pada pelaksanaan program kegiatan dan pelestariannya. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat pedesaan. BKM sendiri berdiri di bawah PNPM Mandiri Perkotaan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.

Namun dalam kenyataannya program-program kerja pembangunan desa terkadang masih belum bisa terlaksana dengan maksimal, sehingga pengendalian akan setiap program kerja sangat diperlukan agar kiranya dapat memaksimalkan terealisasinya program pembangunan tersebut. Dengan demikian keselarasan antara tujuan dan harapan akan bisa sesuai dengan

kenyataan. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kegiatan BKM diperlukan alat bantu berupa audit manajemen. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan akan dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada organisasi tersebut. Audit manajemen atau audit operasional adalah audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bhayangkara, 2010:2).

Peran pengendalian terhadap pelaksanaan program di BKM sangat menentukan keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuannya. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan seperti dari pelaksana program yang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal, anggaran dana yang diperlukan terkadang lebih besar dari anggaran yang sebelumnya direncanakan. Untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan program di BKM telah berjalan dengan efektif, harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program BKM dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana, dan aktivitas pelaksanaan program BKM dapat dilakukan dengan melaksanakan audit manajemen. Hasil audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dapat memberikan gambaran kepada organisasi atau lembaga

mengenai efektivitas pelaksanaan program-programnya dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Peran audit manajemen terhadap pelaksanaan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja masih ada beberapa program yang belum dapat terlaksana. Berkaitan dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Audit Manajemen Atas Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pelaku atau pelaksana program di BKM Kedung Jaya belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
2. Anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya terkadang melebihi anggaran yang sebelumnya telah direncanakan.
3. Program-program kerja pembangunan desa masih belum bisa terlaksana dengan maksimal.
4. Pengendalian terhadap setiap aktivitas pada BKM Kedung Jaya sudah dilakukan hanya saja masih ada beberapa program yang belum dapat terlaksana.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup audit manajemen atas program untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hasil analisis tentang efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen?”

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis tentang efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang audit manajemen, terutama berkenaan dengan proses audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan khususnya yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan lembaga/ perusahaan dalam mengambil keputusan dan dalam mengevaluasi terlaksana atau tidaknya program yang dirancang, serta dapat digunakan untuk menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kinerja lembaga/ perusahaan dalam pencapaian program kerja.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Audit**

###### **a. Pengertian Audit**

American Accounting Association Committee dalam *Basic Auditing Concepts* mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai proses sistematis, audit adalah suatu pendekatan yang logis, terstruktur, dan jelas tujuannya bagi pengambilan keputusan, bukan merupakan proses yang tidak terencana dan asal jadi. Selain itu audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor. Bukti dapat mengambil berbagai macam bentuk seperti dokumen pengujian, observasi oleh auditor, dan konfirmasi saldo-saldo dari pihak ketiga. Meskipun bukti itu sendiri sifatnya dapat lebih atau kurang menyimpulkan (*conclusive*), namun proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti haruslah seobyektif mungkin (Guy, Alderman, Winters, 2002: 5-6).

Adapun definisi audit menurut D. R. Carmichael dan J. J. Willingham dalam Imam Soeharto, (2001: 460) adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengkaji secara objektif bahan bukti (*evidence*) perihal pernyataan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lain. Hal ini bertujuan mencocokkan atau membandingkan dengan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, dari hasil langkah-langkah tersebut, disimpulkan suatu pendapat atau opini dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan audit adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang ditemukan terkait dengan tindakan atau

kejadian ekonomi guna menilai tingkat kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.

**b. Tipe Audit**

Menurut Haryono Jusup (2001:15) tipe-tipe audit pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan, yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa, dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, termasuk catatan kaki.

2. Audit Kesesuaian

Audit kesesuaian bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil audit kesesuaian biasanya dilaporkan kepada seseorang atau pihak tertentu yang lebih tinggi yang ada dalam organisasi yang diaudit dan tidak diberikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

3. Audit Operasional

Audit operasional atau yang biasa disebut audit manajemen adalah pengkajian (*review*) atas setiap bagian dari prosedur dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.

Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga tipe audit yaitu audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, audit ketaatan yang berupa hukum dan regulasi atau kebijakan dan prosedur suatu organisasi, dan audit operasional atau audit manajemen yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu organisasi.

## 2. Audit Manajemen

### a. Pengertian Audit Manajemen

Menurut Bayangkara (2010: 2) audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2009: 146) audit manajemen disebut juga *operational audit, functional audit, system audit* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit manajemen secara garis besar bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan, fungsi-fungsi dalam perusahaan pengguna sumber daya, dan memberikan masukan kepada manajemen untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan.

### b. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Manajemen

Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan

atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program/aktivitas yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan/ peningkatan, baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ada empat elemen pokok dalam tujuan audit, yaitu:

1) Kondisi (*condition*)

Kondisi merupakan deskripsi keadaan riil dari program atau aktivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam suatu perusahaan. Istilah kondisi biasanya mengandung arti hasil aktual, yaitu apa yang auditor temukan selama melakukan observasi. Kondisi harus dinilai secara benar, oleh karena itu informasi yang dikumpulkan harus cukup, kompeten, dan relevan.

2) Kriteria (*criteria*)

Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Dalam pengembangan kriteria ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, antara lain:

- a) Undang-Undang (peraturan) yang berlaku.
- b) Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit.
- c) Norma (standar) yang sudah mendapat pengakuan (diterima) secara umum.
- d) Kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis.
- e) Pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis.

3) Penyebab (*causes*)

Penyebab merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan oleh setiap individu/ kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif, program/ aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif, program/ aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

4) Akibat (*effect*)

Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program/ aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif menunjukkan bahwa program/ aktivitas telah terselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan.

**c. Prinsip Dasar Audit Manajemen**

Ada tujuh prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuan dengan baik, yaitu:

1. Audit dititikberatkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki.
2. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit.
3. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan bersifat positif.
4. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi.
5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab.
6. Pelanggaran hukum.
7. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan.

**d. Tahap-Tahap Audit Manajemen**

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Adapun tahap-tahap audit yang harus dilakukan, yaitu:

**1) Audit Pendahuluan**

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang objek yang diaudit. Pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit serta menganalisis berbagai

informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit.

#### 2) Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Pada tahapan ini auditor melakukan *review* dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

#### 3) Audit Terinci

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan suatu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.

#### 4) Pelaporan

Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan.

#### 5) Tindak Lanjut

Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk

melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

#### e. Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas

Ekonomis (kehematian), efisiensi (daya guna), dan efektivitas (hasil guna) merupakan tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan dan yang harus dicapai perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Adapun penjelasan terkait ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menurut Bhayangkara (2010: 12-14) adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomis  
Berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai program yang dikelola.
- 2) Efisiensi  
Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki.
- 3) Efektivitas  
Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Hans Kartikahadi dalam Sukrisno Agoes (2009: 154) pengertian ekonomis, efisiensi, dan efektivitas adalah:

- 1) Ekonomis berarti cara penggunaan sesuatu barang (hal) auditor menekankan bagaimana seharusnya proses sumber daya berjalan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
- 2) Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.
- 3) Efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasional telah mencapai tujuan baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja maupun batasan waktu yang ditargetkan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal penting yang harus dicapai perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya yaitu pertama, ekonomis berarti melakukan penghematan sumber daya yang digunakan dalam setiap aktivitas. Kedua, efisiensi yang berarti pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin. Ketiga, efektivitas yang berarti tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

### **3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

#### **a. Pengertian BKM**

Menurut Pedoman Umum P2KP, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu organisasi masyarakat yang menjadi pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Tidak satupun anggota BKM yang memiliki hak istimewa dan semua keputusan BKM dilaksanakan secara kolektif melalui mekanisme Rapat Anggota BKM. Musyawarah menjadi norma utama yang mendasari semua pengambilan keputusan.

#### **b. Ciri-Ciri Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

Sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga setempat BKM merupakan bagian organik dari himpunan masyarakat warga tersebut sehingga haruslah memiliki ciri-ciri yang

sama dan posisinya pun sama seperti layaknya masyarakat warga itu sendiri. Adapun ciri-ciri Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yaitu:

- 1) Di luar institusi pemerintah
- 2) Di luar institusi militer
- 3) Di luar institusi agama
- 4) Di luar institusi pekerjaan atau usaha
- 5) Di luar institusi keluarga

Jadi BKM adalah suatu lembaga pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat warga setempat (suatu kelurahan) yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan bukan perwakilan golongan sehingga memungkinkan berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga dan menghindarkan kecenderungan menjadi partisipan.

### c. Bagaimana Anggota BKM Dipilih?

- 1) Anggota BKM dipilih dari dan oleh warga masyarakat di kelurahan bersangkutan yang memenuhi kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama (jujur, rendah hati, tanpa pamrih) yang ditunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar yang dianut dalam memilih pemimpin adalah: "***Lebih baik mendapat pemimpin yang paling buruk dari kumpulan orang-orang baik daripada mendapat pilihan pemimpin yang terbaik dari kumpulan orang-orang buruk***".

- 2) Pemilihan dilakukan tanpa pencalonan dan tiap pemilih harus menulis 3 sampai dengan 5 nama (sesuai kesepakatan warga) yang dianggap memenuhi kriteria seperti pada poin pertama secara rahasia, dikumpulkan, dan dihitung. Kemudian dipilih 9 sampai 17 nama yang mendapat perolehan suara terbanyak sebagai anggota BKM. Para anggota BKM tersebut kemudian memilih siapa di antara mereka yang akan menjabat koordinator, wakil, sekretaris, sesuai dengan kemampuan mereka.
- 3) Pemilihan atau penjaringan utusan dilakukan berjenjang dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dst, yang terpenting pemilihan utusan harus dilakukan di tingkat dimana antar warga saling mengenal (komunitas terkecil seperti RT) karena pemilihan didasarkan atas rekam jejak (*track record*). Bila jumlah RT sedikit maka semua utusan yang terpilih di tingkat RT, yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya misalnya 3 sampai 5 orang, kemudian pada hari yang telah ditentukan langsung berkumpul di kelurahan/desa untuk memilih anggota BKM yang jumlahnya 9 sampai 13 orang di antara utusan (Modul Peran UP, 2012: 5).

**d. Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM**

BKM merupakan lembaga masyarakat warga (*Civil Society Organization*), yang pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun

pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibagun dan dikelola berlandaskan nilai-nilai universal (*value based*). Sebagai lembaga kemasyarakatan yang menanggulangi kemiskinan, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati seluruh masyarakat setempat baik dengan sumber dana P2KP maupun sumber dana lainnya dan mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, BKM perlu membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan. Unit pengelola (kegiatan) adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Adapun unit-unit pengelola yang dibentuk oleh BKM, yaitu:

1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Merupakan salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM P2KP, maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.

2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Merupakan salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di

wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan di kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik di bidang permukiman, dan lain-lain.

### 3) Unit Pengelola Sosial (UPS)

Merupakan salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanhan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/ Desa (KBK/D).

## e. Perencanaan Partisipatif dan Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM)

Perencanaan partisipatif dalam PNPM MP diartikan sebagai alternatif ketiga dari perencanaan dari atas (*top down*) dan perencanaan dari bawah (*bottom up*). Secara tegas perencanaan partisipatif dalam PNPM MP adalah perpaduan antara perencanaan dari atas yang pada dasarnya merupakan keputusan kaum elit dan perencanaan dari bawah yang lebih mewakili aspirasi masyarakat umum di semua tataran atau sering juga diartikan sebagai perpaduan antara perencanaan makro dan mikro. Di tataran masyarakat, BKM/

LKM akan mempresentasikan titik temu tersebut, sedangkan titik temu antara perencanaan masyarakat dengan pemerintah diharapkan terjadi di tingkat kecamatan dimana Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) yang merupakan aspirasi masyarakat bertemu dengan perencanaan makro.

PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu tiga tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan/ desa. PJM Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi Rencana Tahunan (Renta) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan/ desa dan harus dilakukan secara partisipatif.

PJM Pronangkis harus disusun secara partisipatif oleh Tim Perencana Partisipatif (TPP) yang dibentuk oleh BKM/ LKM terdiri dari unsur BKM/ LKM, relawan, warga peduli, dan secara interaktif dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat luar (publik) melalui berbagai media. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang telah diidentifikasi dari awal survei yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh BKM/ LKM dengan membentuk panitia pembangunan, atau kegiatan pembangunan prasarana skala kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan, kegiatan pinjaman bergulir yang nantinya

akan menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi kredit mikro, atau kegiatan sosial untuk membantu warga yang benar-benar tidak mampu, meskipun demikian kegiatan sosial ini harus sudah direncanakan keberlanjutannya.

#### **f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proyek atau Program Kerja**

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu proyek atau program kerja menurut Iman Soeharto (2001: 471-472), yaitu:

- 1) Misi Proyek  
Harus mempunyai definisi awal tentang tujuan yang jelas mengenai diadakannya proyek, serta garis besar petunjuk mengenai cara atau strategi mencapainya.
- 2) Dukungan dari Pimpinan Teras  
Dukungan pimpinan teras misalnya dalam bentuk penyediaan sumber daya yang diperlukan, memberikan otoritas yang cukup untuk pelaksanaan implementasi, mengikuti dan memperhatikan berbagai aspek kritis proyek, serta turun tangan dalam penyelesaiannya.
- 3) Perencanaan dan Jadwal  
Proyek harus memiliki perencanaan dan jadwal secara keseluruhan seperti jadwal penyerahan peralatan utama dan lain-lain. Dalam hal ini termasuk sistem pelaporan dan monitoring yang efektif untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan.
- 4) Konsultasi dengan Pemilik Proyek  
Pemilik proyek (*client*) di sini diartikan sebagai pihak yang akan menerima hasil proyek. Konsultasi dengan pemilik dari waktu ke waktu selama penyelenggaraan proyek akan sangat memperlancar pelaksanaan tahap implementasi sejauh mana keinginan peranan pemilik (misalnya, penentuan jumlah dan macam laporan, sarana fasilitas di lokasi proyek, dan lain-lain). Hal ini berpengaruh terhadap berapa besar dukungan dan bantuan yang mungkin dapat diterima darinya ataupun permintaan yang diajukan oleh pemilik.
- 5) Personil  
Masalah personil bagi proyek adalah yang berhubungan dengan memilih, melakukan negosiasi, merekrut, serta membinanya menjadi satu tim kerja yang efektif. Di sini pimpinan proyek harus bekerja sama dengan bidang-bidang lain, dengan setiap personil yang menjadi tim inti proyek.

- 6) Kemampuan Teknis  
Pelaksana proyek harus memiliki kemampuan teknis dan menguasai betul-betul teknologi dari proyek yang dikerjakan.
- 7) *Acceptance* dari Pihak Pemilik Proyek  
Pemilik ikut aktif melakukan inspeksi, testing uji coba, dan sertifikasi.
- 8) Pemantauan, Pengendalian, dan Umpam Balik  
Tindakan ini diperlukan guna mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan terutama anggaran.
- 9) Komunikasi  
Keperluan adanya komunikasi yang cukup antara peserta proyek dianggap salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan proyek.
- 10) *Trouble shooting*  
Mekanisme ini membantu memperkirakan persoalan yang akan terjadi di kemudian hari sehingga jauh sebelumnya sudah diberikan perhatian yang seksama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek atau program kerja adalah misi proyek, dukungan dari pimpinan teras, perencanaan dan jadwal, konsultasi dengan pemilik proyek, personil, kemampuan teknis, *acceptance* dari pihak pemilik proyek, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik, komunikasi, serta *trouble shooting*. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan dijadikan indikator untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat.

## B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang berjudul “Audit Manajemen Atas Fungsi Sumber Daya Manusia Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Sejahtera Desa Pendowoharjo” oleh Fuad Riyawan Jauhari. Penelitian ini

menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan atas fungsi Sumber Daya Manusia yang ada pada BKM Bina Sejahtera belum berjalan secara efektif karena fungsi SDM belum semuanya dapat direalisasikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fuad Riyawan Jauhari adalah sama-sama terkait dengan audit manajemen di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), hanya saja yang membedakan dengan penelitian Fuad Riyawan Jauhari yaitu terletak pada fungsi yang akan diaudit. Fungsi yang akan diaudit dalam penelitian Fuad Riyawan Jauhari adalah fungsi Sumber Daya Manusia pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Sejahtera Desa Pendowoharjo sedangkan penelitian ini adalah pada program penanggulangan kemiskinan yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

2. Penelitian yang berjudul “Audit Operasional Atas Fungsi Keperawatan Pada Rumah Sakit Rajawali Citra Yogyakarta” oleh Verida Oktafia. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tertulis atau lisan dan kebijakan atas fungsi keperawatan di Rumah Sakit Rajawali Citra Yogyakarta sudah diterapkan serta dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, namun dalam aktivitas di lapangan fungsi keperawatan di Rumah Sakit Rajawali Citra Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan secara efektif, karena masih ada fungsi keperawatan yang belum sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Verida Oktafia adalah sama-sama terkait dengan

audit manajemen atau audit operasional, hanya saja yang membedakan dengan penelitian Verida Oktafia yaitu terletak pada fungsi yang akan diaudit. Fungsi yang akan diaudit dalam penelitian Verida Oktafia adalah fungsi Keperawatan Pada Rumah Sakit Rajawali Citra Yogyakarta sedangkan penelitian ini adalah pada program penanggulangan kemiskinan yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

3. Penelitian yang berjudul “Audit Operasional Atas Perencanaan dan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” oleh Fendhica Nickolan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas pada PNPM MP Desa Tanjungrejo terbilang sudah cukup efektif dan terlaksana dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fendhica Nickolan adalah sama-sama terkait dengan audit manajemen atau audit operasional atas, hanya saja yang membedakan dengan penelitian Fendhica Nickolan yaitu terletak pada lingkup program yang akan diaudit. Program yang akan diaudit dalam penelitian Fendhica Nickloan adalah program dalam lingkup Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian ini adalah pada program penanggulangan kemiskinan yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Kedungpuji, Kecamatan

Gombong, Kabupaten Kebumen yang lingkupnya dibawah naungan PNPM.

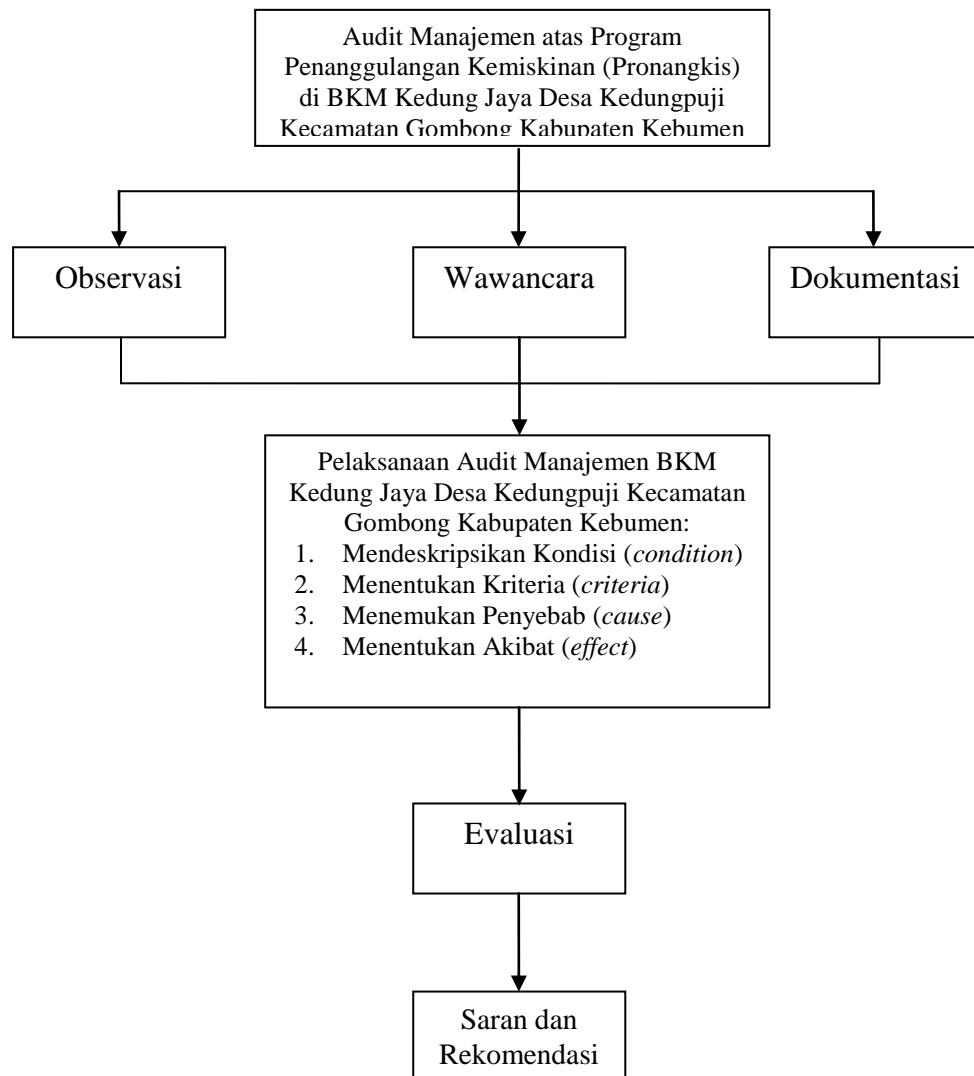
### C. Kerangka Berpikir

Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini, audit manajemen atas penilaian program bertujuan untuk meneliti sejauh manakah tingkat pencapaian efektivitas program-program jangka menengah penanggulangan kemiskinan. Adapun untuk menilai tingkat efektivitas tersebut dibutuhkan empat elemen pokok yang menjadi tujuan audit yang harus dilaksanakan. Pertama, mendeskripsikan tentang kondisi riil dari aktivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada pada BKM Kedung Jaya. Kedua, menentukan kriteria yang merupakan standar atau pedoman bagi BKM Kedung Jaya dalam melakukan aktivitasnya. Ketiga, menemukan penyebab yang ada dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada BKM Kedung Jaya, dalam hal ini penyebab dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada aktivitas yang terjadi apakah lebih tinggi dari standar yang

ditetapkan ataukah lebih rendah. Keempat, menentukan akibat yang timbul dari adanya penyebab yang terjadi pada saat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada BKM Kedung Jaya tersebut, dimana akibat yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung dari tingkat pencapaian pelaksanaannya apakah lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan ataukah lebih rendah. Kemudian empat elemen pokok tersebut dievaluasi untuk selanjutnya dapat diberikan saran atau rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada pada BKM Kedung Jaya, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimanakah kondisi terkait efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimanakah kriteria yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen?
3. Apa saja penyebab yang terdapat pada saat melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen?
4. Bagaimanakah akibat yang timbul dari aktivitas-aktivitas yang terkait dengan efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen?
5. Saran dan rekomendasi apa yang dapat diberikan berdasarkan analisis hasil tentang efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pelaksanaan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan September sampai dengan Bulan November 2014.

#### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan membuat analisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Ciri dari penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif, yang tidak perlu mencari atau menerangkan suatu hubungan, menguji hipotesis, atau membuat ramalan walaupun penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan hal-hal yang mencakup metode-metode deskriptif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah *ex post facto*, yang dalam Sugiyono (2010) adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menuntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah organisasi pelaksana kegiatan program BKM, yang berlokasi di Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Sedangkan objek penelitian ini adalah berupa data seperti catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan di BKM Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

### **D. Variabel Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai variabel tunggal yaitu Audit Manajemen atas Program Penanggulangan Kemiskinan di BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

### **E. Definisi Operasional Variabel**

Audit Manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan

rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) Badan Keswadayaan Masyarakat adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu tiga tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan/ desa. Program Jangka Menengah Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi rencana tahunan yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan suatu kelurahan/ desa dan harus dilakukan secara partisipatif.

Audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan (pronangkis) di BKM merupakan pengkajian dari prosedur dan metode yang ditetapkan suatu organisasi yang dirancang secara sistematis untuk menilai dan melaporkan apakah aktivitas pelaksanaan dalam kegiatan BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak melanggar aturan serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai program penanggulangan kemiskinan yang ada di BKM Kedung Jaya yaitu:

1. Misi Proyek.
2. Dukungan dari pimpinan teras.
3. Perencanaan jadwal.
4. Konsultasi dengan pemilik proyek.
5. Personil untuk tim proyek.
6. Kemampuan teknis.

7. *Acceptance* dari pihak pemilik proyek.
8. Pemantauan, Pengendalian, dan umpan balik.
9. Komunikasi.
10. *Trouble shooting.*

## F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Pada penelitian ini metode observasi digunakan untuk memperoleh gambaran dan informasi secara jelas mengenai bagaimana keadaan maupun aktivitas dan masalah apa saja yang dihadapi oleh BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden atau nara sumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak Munarsis selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau

tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya.

### 3. Dokumentasi

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperoleh dan mendapatkan dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta catatan-catatan yang terdapat di instansi atau perusahaan, seperti daftar program jangka menengah penanggulangan kemiskinan, catatan anggaran yang dikeluarkan untuk setiap program, dan struktur organisasi BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

## G. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini adalah panduan wawancara dengan menggunakan program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program/aktivitas yang diaudit (Bayangkara, 2010: 37).

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Audit Manajemen

Variabel	Indikator	Item
Audit Manajemen	1. Misi Proyek. 2. Dukungan dari pimpinan teras. 3. Perencanaan jadwal. 4. Konsultasi dengan pemilik proyek.	1,2,3 4,5 6,7,8,9 10,11,12,13

Variabel	Indikator	Item
	<p>5. Personil untuk tim proyek.</p> <p>6. Kemampuan teknis.</p> <p>7. <i>Acceptance</i> dari pihak pemilik proyek.</p> <p>8. Pemantauan, Pengendalian, dan umpan balik.</p> <p>9. Komunikasi.</p> <p>10. <i>Trouble shooting.</i></p>	<p>14,15,16</p> <p>17,18</p> <p>19,20</p> <p>21,22,23,24</p> <p>25,26</p> <p>27,28,29</p>

Sumber: Iman Soeharto (2001: 471-472)

## H. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dengan cara mengumpulkan dan menjelaskan data non angka yang kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan untuk memperoleh kejelasan hasil yang dijadikan simpulan dan saran. Selanjutnya data yang diperoleh diidentifikasi untuk memperoleh informasi bagian-bagian yang masih memerlukan peningkatan, baik dari segi ekonomis, efisiensi, maupun efektivitas, kemudian dikelompokkan ke dalam empat elemen dalam tujuan audit, yaitu:

1. Mendeskripsikan Kondisi (*condition*)

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mendeskripsikan keadaan riil dari program atau aktivitas perencanaan dan pelaksanaan BKM

Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen.

## 2. Menentukan Kriteria (*criteria*)

Kriteria (*criteria*) merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman tentang bagaimana seharusnya bagi setiap individu atau kelompok dalam suatu instansi atau perusahaan dalam melakukan aktivitasnya sebagai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan dan menjadi tolok ukur kinerja pada instansi atau perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya kriteria maka dapat diketahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau justru ada kondisi yang menyimpang.

## 3. Mendeskripsikan Penyebab (*cause*)

Penyebab (*causes*) merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok dalam instansi atau perusahaan yang menyebabkan terjadinya kondisi saat ini. Penyebab ini dapat bersifat positif namun ada juga yang bersifat negatif. Dikatakan positif apabila program-program yang ada dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai, sedangkan dikatakan negatif apabila program-program berjalan dengan tingkat efektif dan efisien yang rendah sehingga tujuan belum bisa tercapai.

## 4. Menentukan Akibat (*effect*)

Setelah mengetahui kondisi dan menentukan kriteria serta mendeskripsikan penyebab tahap selanjutnya adalah menentukan akibat

(*effect*). Akibat (*effect*) merupakan dampak yang timbul akibat dilaksanakannya penyebab. Akibat bisa berupa akibat negatif dan akibat positif, akibat negatif menunjukkan program/ aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan sehingga dapat merugikan instansi atau perusahaan, sedangkan akibat positif dapat menguntungkan instansi atau perusahaan. Hal ini ditunjukkan bahwa program telah terlaksana secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Tahap akhir dalam proses pengauditan ini adalah memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan kepada pihak instansi atau perusahaan di masa datang.

Untuk mengetahui tentang efektivitas audit manajemen atas program penanggulangan kemiskinan, BKM Kedung Jaya menggunakan kriteria yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2010 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012, yaitu:

1. Komponen Lingkungan

Sifat kemanfaatan kegiatan bagi program yang masuk dalam komponen lingkungan antara lain:

- a. Merupakan investasi infrastruktur yang diidentifikasi masyarakat dalam PJM Pronangkis.
- b. Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/ manfaat baik kolektif/ komunal maupun kemanfaatan untuk Rumah Tangga miskin.

- c. Diutamakan kegiatan yang mempunyai skala kelurahan dan atau bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun, dst).
- d. Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, integritas, dsb.

## 2. Komponen Sosial

Sifat kemanfaatan kegiatan bagi program yang masuk dalam komponen sosial antara lain:

- a. Kegiatan yang berorientas pada penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin.
- b. Kegiatan yang diusulkan mampu menjadi kegiatan yang berkelanjutan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM.

## 3. Komponen Ekonomi

Sifat kemanfaatan kegiatan bagi program yang masuk dalam komponen ekonomi antara lain:

- a. Kegiatan yang diberikan kepada warga miskin untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya.
- b. Kegiatan yang mampu mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha kecil.
- c. Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/ keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal sosial.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Hasil Audit Pendahuluan**

###### **a. Profil Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya**

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan sebuah kelembagaan yang dirancang dan dibentuk untuk membangun kembali ikatan-ikatan sosial daerah solidaritas sosial masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri. Bentuk organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat dengan nama Kedung Jaya (BKM-KJ) adalah suatu perkumpulan yang mempunyai kepemimpinan kolektif, dimana BKM adalah milik seluruh masyarakat dan milik pemerintah, perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, dan diberi kuasa untuk melakukan penandatanganan dokumen resmi, rekening bank, atau administrasi lainnya. Berkaitan dengan aktivitas legal formal BKM hanya mewakili warga dan tidak berhak memiliki atas asset tetap maupun bergerak dikemudian hari.

BKM-KJ ini dibentuk tepatnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2005 untuk waktu yang tidak terbatas. Sedangkan kedudukan BKM-KJ sendiri yaitu berada di Kelurahan/ Desa Kedumpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah yang berasas dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Landasan operasional BKM Kedung Jaya adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dalam keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan.

**b. Sifat Organisasi BKM Kedung Jaya**

- 1) BKM Kedung Jaya bersifat otonom dan tidak berafiliasi ke pihak manapun, golongan, suku, agama, dan pemerintah. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh BKM Kedung Jaya adalah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan berpijak pada nilai-nilai luhur dan tidak dapat diintervensi dari pihak lain.
- 2) BKM Kedung Jaya saling mengkoordinasi kegiatannya dengan pihak-pihak lain, baik swasta maupun pemerintah khususnya program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 3) BKM Kedung Jaya bertanggung jawab kepada Musyawarah Warga (MG) yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Penyampaian pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan dalam Musyawarah Warga yang disebut Musyawarah Warga Tahunan (MGT).
- 5) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga Tahunan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**c. Visi dan Misi BKM Kedung Jaya**

- 1) Visi BKM Kedung Jaya

Membangun masyarakat lebih beradab/ berakhlakul karimah, kritis, dan terampil sehingga mampu membangun sinergis dengan

berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

2) Misi BKM Kedung Jaya

Membangun masyarakat desa terutama masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lainnya.

**d. Prinsip dan Nilai-Nilai BKM Kedung Jaya**

1) Prinsip BKM Kedung Jaya

BKM Kedung Jaya dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip:

- a) Demokratis.
- b) Partisipasi.
- c) Transparasi dan Akuntabilitas (*Open Management*).
- d) Desentralisasi.
- e) Distribusi cepat, tepat.
- f) Berkelanjutan.

2) Nilai-Nilai BKM Kedung Jaya

BKM Kedung Jaya dalam setiap kegiatannya mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan diantaranya sebagai berikut:

- a) Keadilan.
- b) Kejujuran.

- c) Kesetaraan.
- d) Dapat dipercaya.
- e) Ikhlas.
- f) Kebersamaan dalam keberagaman.

**e. Landasan Penilaian Program Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya**

Adapun yang menjadi landasan maupun kriteria dalam penilaian Program Penanggulangan Kemiskinan pada BKM Kedung Jaya adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012.

**f. Fungsi dan Tujuan BKM Kedung Jaya**

1) Fungsi BKM Kedung Jaya

Dalam musyawarah penanggulangan kemiskinan, BKM berfungsi sebagai pusat kebijakan yang adil dan demokratis, pusat pengendalian pembangunan, sarana informasi dan komunikasi, pusat advokasi, integrasi kebutuhan program masyarakat dengan kebijakan atau program pemerintah setempat.

2) Tujuan BKM Kedung Jaya

Adapun tujuan dari BKM Kedung Jaya diantaranya sebagai berikut:

- a) Tujuan jangka panjang adalah mengangkat derajat keluarga miskin (GAKIN) ke derajat Keluarga Berdaya (GAYA), yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai persoalan

kehidupan masyarakat terutama persoalan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- b) Tujuan jangka pendek adalah meningkatkan potensi dan *skill* keluarga miskin dan menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM, berikut perguliran dana yang keberadaannya merupakan prasyarat bagi pemberian bantuan/ pinjaman kepada masyarakat miskin di kelurahan/ desa.

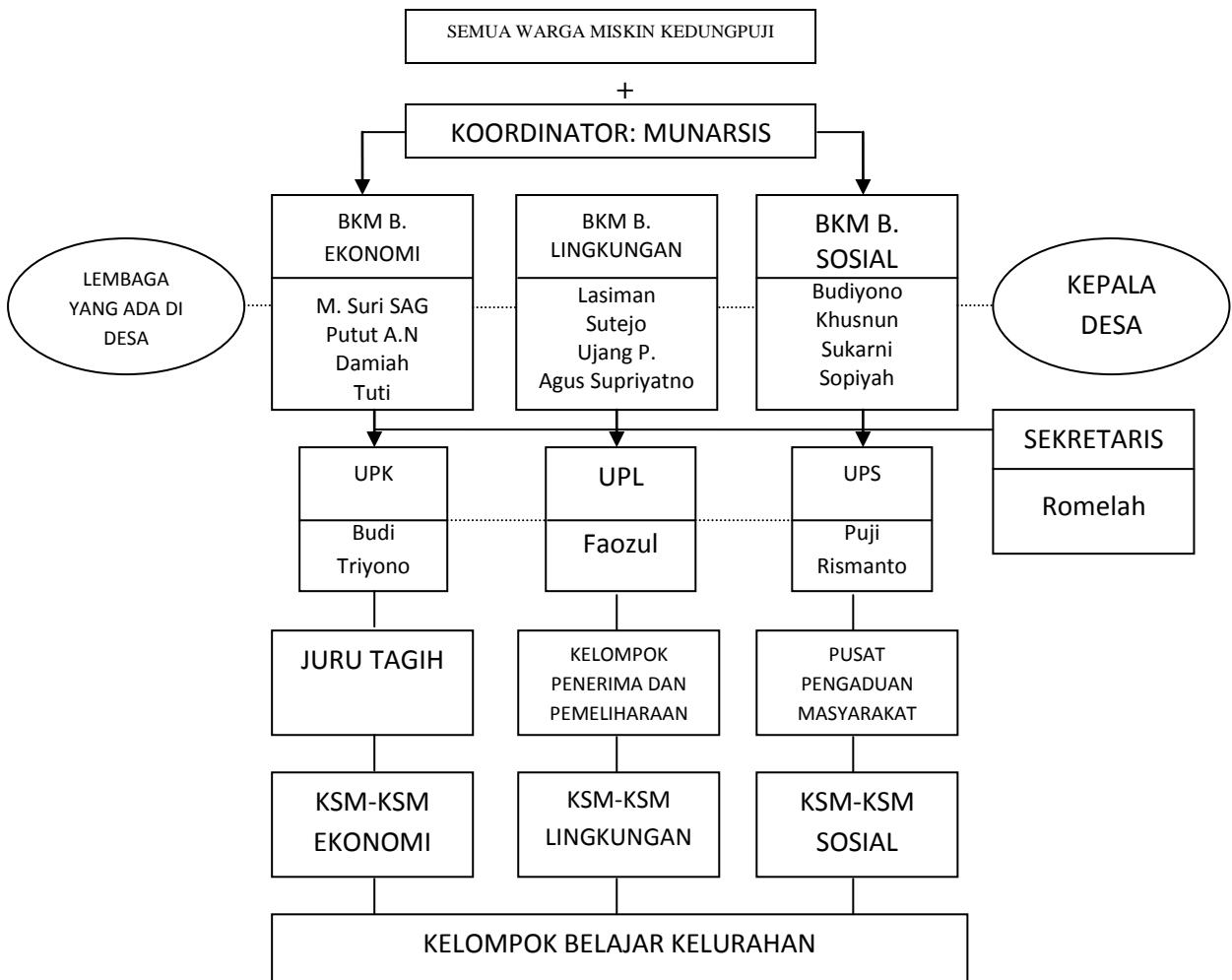
#### **g. Keanggotaan BKM Kedung Jaya**

Keanggotaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kedung Jaya Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen berjumlah 17 orang dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- 1) Koordinator : Munarsis
- 2) Sekretaris : Romelah
- 3) Petugas Unit Pengelola Keuangan : Budi Triyono
- 4) Petugas Unit Pengelola Lingkungan : Faizul
- 5) Petugas Unit Pengelola Sosial : Puji Rismanto
- 6) Anggota :
  - 1) M. Suri SAG
  - 2) Putut A.N
  - 3) Damiah
  - 4) Tuti
  - 5) Lasiman

- 6) Sutejo
- 7) Ujang P.
- 8) Agus Supriyanto
- 9) Budiyono
- 10) Khusnun
- 11) Sukarni
- 12) Sopiyah

### **h. Struktur Organisasi BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji**



Gambar 2. Struktur Organisasi BKM Kedung Jaya

Sumber: Modul Unit Pengelola BKM Kedung Jaya

### **i. Tugas dan Fungsi Unit-Unit pada Organisasi BKM Kedung Jaya**

#### **1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)**

Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya,

baik yang berasal dari dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.

2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan bidang pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik di bidang permukiman dan lain-lain.

3) Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pegelola Sosial adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanhan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/ Desa (KBK/D).

**j. Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan**

## 1) Bidang Lingkungan

Kegiatan pada bidang lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/ manfaat secara kolektif pada peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman yang sehat, tertib, aman, dan teratur. Adapun jenis program pada bidang lingkungan yang ada di BKM Kedung Jaya yaitu:

- a) Sanitasi dan Kebutuhan Dasar Warmis.
- b) Sarana Penanganan Banjir.
- c) Drainase.
- d) Jamban Kesehatan.
- e) Pembuatan TPS
- f) Perumahan dan Fasilitas Umum.
- g) Jalan Lingkungan.
- h) Penerangan Jalan Umum.
- i) Sarana Air Bersih.
- j) Gorong-Gorong.
- k) Jalan Alternatif.
- l) Jembatan.

## 2) Bidang Sosial

Kegiatan pada bidang sosial merupakan kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong,

tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dan lain-lain. Adapun jenis program pada bidang sosial yang ada di BKM Kedung Jaya yaitu:

- a) Santunan Fakir Miskin, Jompo, Yatim.
  - b) Pendidikan.
  - c) Kesehatan.
  - d) Penguatan Komunitas.
  - e) Penguatan Kapasitas Hidup Warmis.
- 3) Bidang Ekonomi

Kegiatan pada bidang ekonomi merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/ keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal sosial. Adapun jenis program pada bidang ekonomi yang ada di BKM Kedung Jaya yaitu:

- a) Penguatan Daya Beli.
- b) Penguatan Usaha Warmis.

## **2. Hasil Survei Pendahuluan**

Adapun temuan-temuan yang diperoleh dalam survei pendahuluan, antara lain:

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk program sarana penanganan banjir pada BKM Kedung Jaya terlalu besar.

- b. Dalam perencanaan program jamban kesehatan BKM Kedung Jaya tidak sepenuhnya melihat kondisi yang ada di masyarakat.
- c. Perencanaan program penerangan jalan umum BKM Kedung Jaya tidak melihat kondisi yang ada di masyarakat sehingga program ini dirasa kurang tepat sasaran.
- d. Program sarana air bersih dirasa kurang tepat untuk dilaksanakan karena warga miskin sudah memiliki sumber air bersih yang berasal dari sumur sendiri.
- e. Biaya yang dikeluarkan untuk program jalan alternatif pada BKM Kedung Jaya terlalu besar.
- f. Perencanaan program santunan fakir miskin, jompo, yatim belum sepenuhnya melihat kondisi yang ada di lingkungan masyarakat sehingga program ini dirasa kurang efektif.
- g. Program penguatan komunitas dirasa tidak spesifik kepada Program Penanggulangan Kemiskinan.
- h. Program penguatan kapasitas hidup warga miskin belum dapat terlaksana karena tidak ada ketersediaan lahan untuk diolah oleh warga miskin.
- i. Program penguatan daya beli yang direncanakan oleh BKM Kedung Jaya dirasa tidak begitu spesifik ke arah program penanggulangan kemiskinan.
- j. Biaya yang dikeluarkan untuk program penguatan usaha warga miskin pada BKM Kedung Jaya terlalu besar.

### **3. *Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen***

Hasil dari *review* dan pengujian pengendalian manajemen atas program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) adalah:

- a. BKM Kedung Jaya telah mempunyai struktur organisasi dan pembagian tugas yang cukup jelas untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- b. BKM Kedung Jaya mempunyai Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai acuan dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan.
- c. BKM Kedung Jaya melakukan evaluasi setelah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

## **B. Analisis Data tentang Efektivitas Audit Manajemen Atas Program Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Analisis tentang Efektivitas**

#### **a. Sarana Penanganan Banjir**

##### **1) Kondisi**

Sarana penanggulangan banjir yang direncanakan adalah membuat tanggul sungai yang dilakukan oleh KSM, warga miskin, masyarakat daerah setempat dan didampingi oleh fasilitator. Pembuatan tanggul ini merupakan investasi infrastruktur yang dibuat oleh masyarakat, biasanya bisa bertahan untuk beberapa tahun. Tujuan pembuatan tanggul ini adalah untuk menjaga

keamanan bagi rumah warga miskin yang berada di dekat sungai agar tidak terkena banjir. Kondisi tanggul sungai yang ada di Desa Kedungpuji sampai saat ini masih sangat baik.

## 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program sarana penanganan banjir sebagai komponen lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan investasi infrastruktur yang diidentifikasi masyarakat dalam PJM Pronangkis.
- b) Memberikan dampak/ manfaat secara kolektif melalui peningkatan kualitas yang sehat, tertib, aman, dan teratur.
- c) Dilakukan oleh KSM dibantu oleh warga miskin dan masyarakat daerah setempat dengan didampingi oleh fasilitator yang ditunjuk langsung oleh Koordinator Kota.

## 3) Penyebab

- a) Biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan tanggul sungai ini terlalu besar.

b) Proyek pembangunan sarana penanganan banjir ini sudah dilakukan atau ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

4) Efek

Tidak adanya kerusakan sarana penanganan banjir berarti program ini tidak perlu dilaksanakan oleh BKM Kedung Jaya, karena setiap program yang dilaksanakan melihat kondisi dari sarana dan prasarana apakah perlu pembangunan dan perbaikan atau tidak. Selain itu pelaksanaan program ini juga

**b. Jamban Kesehatan**

1) Kondisi

Jamban kesehatan merupakan investasi infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup sehat bagi warga miskin. Dalam hal ini masyarakat Desa Kedungpuji khususnya masyarakat yang tergolong warga miskin sudah memiliki jamban yang sesuai standar kesehatan. Pada periode 2012-2014 kondisi jamban yang dimiliki oleh masyarakat warga miskin masih sangat baik dan belum membutuhkan perbaikan.

2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 halaman 24

sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program jamban kesehatan sebagai komponen lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan investasi infrastruktur yang diidentifikasi masyarakat dalam PJM Pronangkis.
- b) Memberikan dampak/ manfaat secara kolektif melalui peningkatan kualitas yang sehat, tertib, aman, dan teratur.

3) Penyebab

- a) Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan masyarakat.
- b) Setiap warga miskin sudah memiliki jamban yang layak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

4) Efek

Tidak terlaksananya program penanggulangan kemiskinan terkait dengan jamban kesehatan bagi warga miskin seperti yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.

### c. Penerangan Jalan Umum

#### 1) Kondisi

Program penerangan jalan umum merupakan program investasi infrastruktur yang tertuang dalam PJM Pronangkis yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di wilayah desa (lintas RT/ RW). Namun pada umumnya jalan umum yang ada di Desa Kedungpuji rata-rata sudah ada penerangannya terutama di jalan umum yang sering dilalui kendaraan. Selain itu setiap rumah biasanya sudah memasang lampu jalan masing-masing.

#### 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program penerangan jalan umum sebagai komponen lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan investasi infrastruktur yang diidentifikasi masyarakat dalam PJM Pronangkis.
- b) Memberikan dampak/ manfaat secara kolektif melalui peningkatan kualitas yang sehat, tertib, aman, dan teratur.

c) Diutamakan pada lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun).

3) Penyebab

a) Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan masyarakat.

b) Dirasa kurang perlu karena tiap rumah sudah memasang lampu jalan masing-masing.

4) Efek

Program penerangan jalan umum belum terlaksana karena memang dirasa belum perlu dan sudah ada penerangan dari rumah-rumah warga.

**d. Sarana Air Bersih**

1) Kondisi

Program sarana air bersih merupakan investasi infrastruktur masyarakat yang terdapat dalam PJM Pronangkis yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan bagi warga miskin. Sarana air bersih yang dimiliki oleh masyarakat Kedungpuji khususnya warga miskin berupa sumur-sumur yang kondisinya masih baik dan memiliki air jernih. Bentuk dan ukuran sumur yang dimiliki rata-rata sudah sesuai karena memang pembuatan sumur sudah dilakukan sejak dulu.

## 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program sarana air bersih sebagai komponen lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan investasi infrastruktur yang diidentifikasi masyarakat dalam PJM Pronangkis.
- b) Memberikan dampak/ manfaat secara kolektif melalui peningkatan kualitas yang sehat, tertib, aman, dan teratur.

## 3) Penyebab

- a) Kebanyakan sumur-sumur yang dimiliki warga miskin tergolong sumur bersih.
- b) Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk warga miskin.

## 4) Efek

Program penanggulangan kemiskinan terkait dengan sarana air bersih tidak terealisasi seperti yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.

### e. Jalan Alternatif

#### 1) Kondisi

Program jalan alternatif merupakan investasi infrastruktur yang terdapat dalam PJM Pronangkis. Pelaksanaan program ini biasanya dilakukan oleh KSM dibantu oleh warga miskin dan masyarakat daerah setempat secara bergotong royong dengan didampingi oleh fasilitator yang ditunjuk langsung oleh Koordinator Kota. Pembuatan jalan alternatif di Desa Kedungpuji biasanya dilakukan melalui pemetaan jalan-jalan kecil penghubung antar dusun. Pembuatan jalan alternatif ini memerlukan dana yang cukup besar karena jika melewati lahan milik pribadi maka desa harus mengganti lahan yang dipakai tersebut.

#### 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program jalan alternatif sebagai komponen lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan investasi infrastruktur yang diidentifikasi masyarakat dalam PJM Pronangkis.
  - b) Diutamakan pada lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun).
  - c) Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, dan integritas.
- 3) Penyebab
- a) Dana yang dikeluarkan terlalu besar.
  - b) Dana yang diperoleh BKM Kedung Jaya digunakan untuk pelaksanaan program lainnya sehingga tidak ada dana yang cukup besar untuk melaksanakan program pembuatan jalan alternatif.
- 4) Efek

Tidak terlaksananya program penanggulangan kemiskinan terkait dengan pembuatan jalan alternatif sesuai dengan yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.

**f. Santunan Fakir Miskin, Jompo, Yatim**

1) Kondisi

Santunan yang diberikan biasanya berupa bazar pasar murah yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako (beras, minyak, telur, gula) untuk warga yang tergolong warga miskin. Tujuan program ini adalah untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong untuk warga yang tidak mampu.

Pelaksana kegiatan ini adalah KSM dan panitia kecil yang ditunjuk oleh KSM untuk membantu. Namun untuk periode tiga tahun ini bazar pasar murah tidak diadakan.

## 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 yang tercantum pada halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 yang tercantum pada halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program santunan fakir miskin, jompo, yatim sebagai komponen sosial adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalinya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll.
- b) Kegiatan yang diusulkan mampu menjadi kegiatan yang berkelanjutan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM.

3) Penyebab

- a) Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan masyarakat.
- b) Kegiatan ini dirasa kurang efektif.

4) Efek

Dirasa kurang efektif dan melihat kondisi yang ada maka program santunan fakir miskin, jompo, yatim belum perlu untuk direalisasikan.

**g. Penguatan Komunitas**

1) Kondisi

Melihat banyaknya lembaga masyarakat terutama lembaga yang diadakan oleh para pemuda dimana hampir setiap RW memiliki lembaga tersebut maka BKM Kedung Jaya bermaksud untuk menyatukan beberapa lembaga tersebut menjadi satu kesatuan yang kuat dan saling bekerja sama sehingga tercipta etos kerja dan integritas yang baik. Kegiatan penguatan komunitas ini menggunakan dana yang bersumber dari bantuan langsung masyarakat yang diturunkan melalui BKM.

2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 yang tercantum pada halaman 17 sampai 18

dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 yang tercantum pada halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program penguatan komunitas sebagai komponen sosial adalah kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll.

3) Penyebab

- a) Tidak disetujui oleh Koordinator Kota (Korkot).
- b) Program penguatan komunitas dirasa tidak spesifik kepada Program Penanggulangan Kemiskinan.

4) Efek

Dirasa tidak begitu efektif maka program penguatan komunitas tidak dapat terlaksana atau terealisasi sesuai dengan yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.

**h. Penguatan Kapasitas Hidup Warga Miskin**

1) Kondisi

Penguatan kapasitas hidup warga miskin yang dilakukan oleh BKM yaitu berupa sawah bergulir yang biasanya berasal dari sawah bengkok kepala desa dan dibiayai oleh P2KP yang

kemudian diberikan kepada warga miskin tiap RT untuk diolah secara bergilir. Program ini bermanfaat untuk menolong dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga miskin. Pendapatan dari hasil sawah yang dikelola tersebut akan dikembalikan ke KSM sebagai pinjaman modal sedangkan keuntungan yang diperoleh diberikan untuk warga miskin itu sendiri.

## 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 yang tercantum pada halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 yang tercantum pada halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program penguatan kapasitas hidup warga miskin sebagai komponen sosial adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalinnya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll.
- b) Kegiatan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin (PS-2).

4) Penyebab

- a) Pergantian kepemimpinan (Kepala Desa).
- b) Tidak ada ketersediaan lahan untuk diolah oleh warga miskin.

5) Efek

- a) Tidak terlaksananya program penanggulangan kemiskinan terkait dengan penguatan kapasitas hidup warga miskin sesuai dengan yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.
- b) Warga miskin tidak dapat memperoleh modal dari KSM untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang seharusnya didapat.

i. **Penguatan Daya Beli**

1) Kondisi

Usaha penguatan daya beli yang dilakukan oleh BKM Kedung Jaya berupa penjualan sembako murah di bawah harga pasar. Penjualan sembako murah ini ditujukan bagi warga miskin yang sudah didata oleh masing-masing RT. Program ini bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat miskin.

2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 yang tercantum pada halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012

yang tercantum pada halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program penguatan daya beli sebagai komponen ekonomi adalah untuk mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha kecil.

3) Penyebab

- a) Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan masyarakat.
- b) Program penguatan daya beli merupakan pemetaan dan tidak begitu spesifik ke arah program penanggulangan kemiskinan.

4) Efek

- a) Daya beli masyarakat rendah dan masyarakat cenderung tidak membeli produk olahan sendiri.
- b) Tidak terlaksananya program penanggulangan kemiskinan terkait dengan penguatan daya beli sesuai dengan yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.

**j. Penguatan Usaha Warga Miskin**

1) Kondisi

Bentuk penguatan usaha warga miskin yang dilakukan oleh BKM Kedung Jaya berupa alat perut kelapa. Hal ini ditujukan

untuk membantu warga miskin dalam pengadaan alat yang digunakan untuk peningkatan usaha sehingga penghasilan yang dimiliki bisa meningkat. Sumber dana yang digunakan untuk program ini berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat.

## 2) Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2010 yang tercantum pada halaman 17 sampai 18 dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 yang tercantum pada halaman 24 sampai 25. Setiap program penanggulangan kemiskinan menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Dirjen Pengelola Unit. Adapun sifat kemanfaatan program penguatan usaha warga miskin sebagai komponen ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/ keluarga maupun kelompok dan sekaligus membangun modal sosial.
- b) Kegiatan mampu mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha kecil.

## 3) Penyebab

- a) Minat masyarakat masih tergolong kurang untuk menekuni penciptaan usaha.

- b) Tidak disetujui oleh Koordinator Kota karena bersifat pengadaan bukan tindakan yang lebih spesifik ke arah peningkatan kesejahteraan warga miskin.
- 4) Efek
- a) Tidak semua warga miskin bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mandiri.
  - b) Tidak terlaksananya program penanggulangan kemiskinan terkait dengan penguatan usaha warga miskin sesuai dengan yang direncanakan pada Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedung Jaya.

## 2. Rekomendasi

Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Bagi kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh manajemen organisasi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu:

- a. Sebelum membuat perencanaan program penanggulangan kemiskinan, sebaiknya BKM Kedung Jaya melakukan survei terlebih dahulu agar program yang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat berjalan dengan efektif.

- b. Organisasi harus merencanakan dana yang diperoleh dengan sebaik mungkin agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan.
- c. Dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, organisasi seharusnya mempersiapkan alternatif lain jika rencana pertama yang disusun tidak dapat terlaksana.

## C. Pembahasan

### 1. Sarana Penanganan Banjir

Sarana penanganan banjir pada BKM Kedung Jaya tidak perlu dilaksanakan karena memang tidak ada kerusakan tanggul. Selain itu proyek pembangunan sarana penanganan banjir ini biasanya sudah dilakukan atau ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

### 2. Jamban Kesehatan

Program jamban kesehatan pada BKM Kedung Jaya belum direalisasikan. Hal ini disebabkan tidak adanya kerusakan dan rata-rata jamban yang dimiliki oleh warga miskin sudah layak dan telah mencapai standar jamban sehat yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

### 3. Penerangan Jalan Umum

Program penerangan jalan umum pada BKM Kedung Jaya biasanya dilakukan dengan memasang lampu besar di titik-titik tertentu yang memerlukan penerangan cukup. Namun dalam hal ini program

penerangan jalan umum belum terlaksana karena memang dirasa belum perlu dan sudah ada penerangan dari rumah-rumah warga.

#### 4. Sarana Air Bersih

Program sarana air bersih pada BKM Kedung Jaya belum perlu untuk direalisasikan karena masyarakat yang tergolong warga miskin di Desa Kedungpuji sudah memiliki sumur-sumur bersih yang menjadi sarana untuk penampungan air bagi mereka.

#### 5. Jalan Alternatif

Program pembuatan jalan alternatif pada BKM Kedung Jaya belum dapat terealisasikan mengingat dana yang dibutuhkan untuk membuat jalan alternatif tidaklah sedikit melainkan memerlukan dana yang cukup besar. Sedangkan sumber dana yang diperoleh juga digunakan untuk pelaksanaan program lainnya.

#### 6. Santunan Fakir Miskin, Jompo, Yatim

Program santunan fakir miskin, jompo, yatim pada BKM Kedung Jaya tidak direalisasikan karena program ini dirasa kurang efektif. Sehingga untuk periode ini santunan untuk fakir miskin, jompo, dan yatim tidak dilaksanakan. Hal ini tidak sesuai yang terdapat dalam perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

#### 7. Penguatan Komunitas

Program penguatan komunitas pada BKM Kedung Jaya tidak dapat terealisasikan. Program ini tidak mendapat persetujuan dari Koordinator Kota (Korkot) karena tidak spesifik pada program penanggulangan

kemiskinan. Penguatan komunitas yang dilakukan oleh BKM Kedung Jaya adalah kegiatan untuk memperkuat komunitas lembaga-lembaga kecil yang ada di Desa Kedungpuji agar saling bekerja satu sama lain. Hal ini tidak termasuk dalam peningkatan kesejahteraan warga miskin.

#### 8. Penguatan Kapasitas Hidup Warga Miskin

Penguatan kapasitas hidup warga miskin (warmis) pada BKM Kedung Jaya dilakukan dengan memberikan sawah untuk diolah oleh warga miskin dengan memberikan bantuan modal yang keuntungannya nanti dapat diambil oleh warga miskin tersebut. Program penguatan kapasitas hidup warmis pada periode ini belum dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya pergantian kepala desa dan tidak ada ketersediaan lahan untuk diolah.

#### 9. Penguatan Daya Beli

Penguatan daya beli pada BKM Kedung Jaya belum dapat terealisasikan. Hal ini disebabkan program ini tidak mendapat persetujuan dari Koordinator Kota. Program penguatan daya beli merupakan pemetaan dan tidak begitu spesifik ke arah program penanggulangan kemiskinan.

#### 10. Penguatan Usaha Warga Miskin

Penguatan usaha warga miskin pada BKM Kedung Jaya belum dapat terealisasikan. Program ini tidak disetujui oleh Koordinator Kota karena bersifat pengadaan bukan tindakan yang lebih spesifik ke arah peningkatan kesejahteraan warga miskin.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis tentang efektivitas Audit Manajemen Atas Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di Badan Kewadayaan Masyarakat Kedung Jaya Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang ada di BKM Kedung Jaya terdiri dari tiga komponen kegiatan yaitu pertama, komponen lingkungan yang terdiri dari program sanitasi dan kebutuhan warga miskin, sarana penanganan banjir, drainase, jamban kesehatan, pembuatan TPS, perumahan dan fasilitas umum, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, sarana air bersih, gorong-gorong, jalan alternatif, dan pembuatan jembatan. Kedua, komponen sosial terdiri dari program santunan fakir miskin, jompo, dan yatim, program pendidikan, program kesehatan, penguatan komunitas, dan penguatan kapasitas hidup warga miskin. Ketiga, komponen ekonomi yang terdiri dari program penguatan daya beli dan penguatan usaha warga miskin.
2. Secara umum pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada BKM Kedung Jaya sudah berjalan cukup efektif. Hasil yang dicapai pada setiap program sudah sesuai dengan tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Kedungpuji, sehingga sebagian besar warga

miskin dapat merasakan manfaat dari adanya program tersebut karena setiap program yang dilaksanakan adalah program yang diusulkan oleh masyarakat Desa Kedungpuji. Namun dalam pelaksanaan setiap program penanggulangan kemiskinan masih terdapat beberapa program yang belum dapat terlaksana dan beberapa program yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Program-program ini sudah terdapat dalam perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), hanya saja dalam perencanaannya BKM Kedung Jaya tidak sepenuhnya melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan masyarakat apakah perlu perbaikan atau tidak. Adapun beberapa program yang belum dapat terlaksana di antaranya yaitu program sarana penanganan banjir, jamban kesehatan, penerangan jalan umum, sarana air bersih, jalan alternatif, santunan fakir miskin, jompo, yatim, penguatan komunitas, penguatan kapasitas hidup warga miskin, penguatan daya beli, dan penguatan usaha warga miskin.

3. Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari tim pengelola yang ditunjuk oleh BKM untuk terjun langsung ke lapangan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibantu oleh warga miskin dan masyarakat setempat dengan didampingi oleh fasilitator yang ditunjuk langsung oleh Koordinator Kota untuk melakukan pengawasan. KSM nantinya akan melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada BKM untuk

dievaluasi. Selain itu untuk setiap kegiatan juga didokumentasikan dengan memberikan bukti berupa foto saat pelaksanaan kegiatan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat berguna bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan periode selanjutnya pada BKM Kedung Jaya Desa Kedungpuji. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum membuat perencanaan program penanggulangan kemiskinan, sebaiknya BKM Kedung Jaya melakukan survei terlebih dahulu agar program yang direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat berjalan dengan efektif.
2. Organisasi harus merencanakan dana yang diperoleh dengan sebaik mungkin agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan.
3. Dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, organisasi seharusnya mempersiapkan alternatif lain jika rencana pertama yang disusun tidak dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhayangkara. (2010). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2008). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008, Bersama Membangun Kemandirian*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Bersama Membangun Kemandirian, Dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Berkelaanjutan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Bersama Membangun Kemandirian*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Badan Keswadayaan Masyarakat. (2012). Modul Peran Unit Pengelola.
- Fendhica Nickolan. (2012). Audit Operasional Atas Perencanaan dan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fuad Riyawan Jauhari. (2012). Audit Manajemen Atas Fungsi Sumber Daya Manusia Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Sejahtera Desa Pendowoharjo. *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Guy, Alderman, dan Winters. (2002). *Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Haryono Jusup. (2001). *Auditing (Pengauditan)*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Iman Soeharto. (2001). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes. (2009). *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Negeri Yogyakarta. (2008). *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Usum MD, Ikhyaul. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Verida Oktafia. (2011). Audit Operasional Atas Fungsi Keperawatan Pada Rumah Sakit Rajawali Citra Yogyakarta. *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

# **LAMPIRAN**

**BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
“KEDUNG JAYA”**

**Desa Kedungpuji – Kec. Gombong**  
**Sekretariat: Jl. Pucang Kembar No. 1 (Komplek Balai Desa)**



No : 02/ BKMKJ/ 1/ 2015

Kedungpuji, 7 Januari 2015

Hal : Surat Pernyataan Penelitian

Hormat Kami,

Saya selaku koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya Desa

Kedungpuji, menyatakan bahwa:

Nama : Zidni Maghfirotul Anam

NIM : 13812142019

Telah melakukan penelitian di Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) pada Bulan September sampai dengan Bulan November 2014.

Hormat Kami Pimpinan Kolektif BKM,

Koordinator BKM



Sekretaris

Romelah

**PROGRAM AUDIT - BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
KEDUNG JAYA DESA KEDUNGPUJI**

**TABEL 1.1 Program Audit - Program Penanggulangan Kemiskinan**

Nama Organisasi : Badan Keswadayaan Masyarakat Kedung Jaya Desa Kedungpuji	Periode Audit: 2014
Program yang Diaudit : Program Penanggulangan Kemiskinan BKM Kedng Jaya	

Nomor	Langkah Kerja	Jawaban		Komentar
		Ya	Tidak	
1	Apakah prasaran yang dibangun sudah sesuai dengan tujuan dari program penanggulangan kemiskinan?	✓		Tujuan pronangkis adalah untuk mensejahterakan kehidupan warga miskin yang memang membutuhkan. Warga miskin yang terdaftar adalah warga miskin yang diajukan dari RT dan masyarakat lainnya yang memang pantas untuk diberikan bantuan.
2	Apakah terdapat petunjuk atau strategi yang digunakan dalam pembangunan prasarana?	✓		Petunjuk yang digunakan dalam pembangunan prasarana tertuang dalam AD/ART dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
3	Apakah sarana prasarana yang dibangun bermanfaat bagi warga miskin?	✓		Semua sarana dan prasarana yang dibuat sesuai dengan usulan-usulan dari masyarakat dan memang dirasa perlu untuk dibangun.
4	Apakah terdapat dukungan dari ketua pelaksana kegiatan program penanggulangan kemiskinan?	✓		Ketua lebih mendominasi dan memberi kebijakan dalam pelaksanaan tiap program demi

					keberhasilan program yang sedang dijalankan.
	5	Bagaimana ketua pelaksana dalam memberikan arahan, apakah ketua pelaksana juga ikut serta dalam pembangunan program penanggulangan kemiskinan?	✓		Ketika ada usulan KSM berembuk untuk membuat panitia pelaksana pada program yang akan dikerjakan. Biasanya ketua mengkoordinir dengan mengadakan rapat kecil dengan anggota dari wilayah yang akan diadakan kegiatan.
	6	Apakah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya?		✓	Hal ini disebabkan karena menunggu dana cair yang memang membutuhkan proses cukup panjang dalam pencairannya.
	7	Apakah pengadaan bahan baku dan peralatan selalu datang tepat waktu?	✓		Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh KSM selaku panitia pelaksana.
	8	Dalam pemakaian bahan apakah sudah sesuai dengan jumlah bahan yang dibeli?	✓		Pemakaian bahan baku yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibeli karena sudah direncanakan sebelumnya.
	9	Apakah setiap pembelian bahan baku terdapat bukti penerimaan dan sudah dibukukan?	✓		Bukti penerimaan penting untuk pembuatan LPJ kegiatan.
	10	Apakah segala sesuatu terkait administrasi telah dianalisis oleh pihak PNPM atau pemerintah daerah setempat?	✓		Setiap kegiatan yang sedang dilaksanakan selalu didampingi oleh fasilitator (tenaga rekrutmen dari konsultan). Fasilitator mendampingi dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan.

	11	Apakah prasarana yang dibangun sesuai dengan daftar usulan dalam lokakarya tingkat desa/kelurahan?	✓		Setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti membangun sarana prasarana memang berdasarkan usulan-usulan yang sudah dicatat dalam daftar usulan lokakarya yang sebelumnya sudah dirapatkan untuk kemudian dituangkan dalam PJM Pronangkis.
	12	Apakah sarana prasarana yang dibangun berada pada lokasi yang tepat?	✓		Sudah berada di lokasi yang diusulkan oleh masyarakat.
	13	Apakah desain sarana yang dibangun sudah dibuat berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan?	✓		Sarana yang dibangun sudah sesuai desain yang direncanakan sebelumnya.
	14	Apakah tenaga kerja yang digunakan sudah melibatkan masyarakat sekitar terutama rumah tangga miskin?	✓		Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah melibatkan warga miskin dan masyarakat setempat sebagai tenaga swadaya.
	15	Apakah jumlah dan nama tenaga kerja sesuai dengan tenaga kerja yang mendaftar?	✓		Jumlah tenaga yang mendaftar sudah sesuai dengan daftar yang direncanakan, terkadang justru dalam praktiknya terdapat tambahan tenaga kerja yang memang dengan sukarela bergotong royong untuk membantu.
	16	Apakah biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja sesuai	✓		Biaya yang dibayarkan kepada

		dengan kehadiran di lapangan dan sesuai musyawarah yang telah disepakati sebelumnya?			tenaga ahli dan tenaga yang terdaftar sebelumnya sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama KSM pada rapat perencanaan.
	17	Apakah tenaga kerja yang dipekerjakan memiliki kemampuan yang baik dan mengerti teknologi yang digunakan dalam pembangunan prasarana?	✓		Tenaga ahli yang digunakan sudah memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan tenaga swadaya (masyarakat yang bergotong royong) biasanya hanya membantu tenaga ahli untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tersendiri.
	18	Apakah teknik pembuatan sarana prasarana telah diperiksa oleh fasilitator kabupaten?	✓		Setiap program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan selalu diperiksa dan didampingi oleh fasilitator yang sudah ditunjuk langsung oleh koordinator kota untuk tingkat desa.
	19	Apakah terdapat test uji coba kelayakan prasarana yang dibuat?	✓		Untuk setiap pembangunan sarana prasarana yang dibangun pasti dilakukan uji coba kelayakan. Misalnya dalam pembuatan jalan desa, dilihat

					apakah campuran bahan sudah sesuai atau belum.
	20	Apakah dalam pelaksanaan pembangunan prasarana warga ikut serta dalam melakukan pengawasan?	✓		Biasanya yang menjadi perwakilan warga untuk melakukan pengawasan adalah ketua RT.
	21	Apakah secara visual pembangunan sarana prasarana sesuai dengan yang diusulkan sebelumnya?	✓		Pembangunan sarana prasarana sudah dilakukan sesuai yang diusulkan masyarakat dalam lokakarya tingkat Desa.
	22	Apakah satuan bahan dalam pembuatan rencana anggaran biaya sesuai dengan hasil survey terkait harga dan kualitas bahan?	✓		Sudah sesuai dengan rencana anggaran karena yang direncanakan sesuai standar SNI.
	23	Apakah bahan yang digunakan sudah sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat?		✓	Kadang jika ada kenaikan harga maka biaya yang dikeluarkan tidak sesuai anggaran yang direncanakan, namun dalam hal ini tidak mengurangi volume.
	24	Apakah komposisi dalam rencana anggaran biaya terdiri dari kebutuhan bahan, tenaga kerja, alat, dan biaya umum lainnya?	✓		Komposisi dalam rencana anggaran biaya sudah mencakup keseluruhan biaya.
	25	Apakah setiap pekerja mengkomunikasikan dengan baik pekerjaannya dengan ketua pelaksana maupun pekerja lain?	✓		Setiap pekerja selalu mengkomunikasikan pekerjaannya dengan baik dan saling mendukung agar tidak terjadi miss komunikasi.
	26	Apakah komunikasi yang baik antar pelaksana sangat berpengaruh besar bagi keberhasilan pembangunan	✓		Komunikasi yang baik sangat berpengaruh agar pekerjaan yang

		pronangkis?			dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan.
	27	Apakah terdapat laporan akhir kegiatan prasarana yang dibuat oleh tim pengelola kegiatan?	✓		Laporan akhir kegiatan berupa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
	28	Apakah sebelum dilakukan pembangunan pronangkis sudah disiapkan alternatif lain jika alternatif pertama tidak terlaksana?		✓	Tidak ada alternatif lain karena tenaga pencari channel ke CSR belum ada.
	29	Apakah terdapat dokumentasi seperti foto kegiatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dibuat untuk kemajuan kegiatan?	✓		Foto dokumentasi kegiatan dicantumkan dalam LPJ kegiatan.

**PERENCANAAN JANGKA MENENGAH ( PJM )**  
**PRONANGKIS DESA KEDUNG PUJI**  
**TAHUN 2012 - 2014**

Nama BKM : KEDUNG JAYA  
 Desa/Kelurahan : KEDUNG PUJI

Kecamatan : GOMBONG  
 Kota/Kabupaten : KEBUMEN

Prop : JAWA TENGAH

Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dalam lokakarya tingkat Desa/Kel dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun, usulan tata ruang wilayah program, kami jadikan PJM Pronangkis 3 (tiga) tahun, bersama ini disepakati.

Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) BKM Kedung Jaya periode tahun duaribu dua belas ( 2012 ) s/d tahun duaribu empat belas ( 2014 ) di Desa Kedungpuji.

Dalam Rencana Pronangkis ini, diusulkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KSM, rencana kegiatan yang memerlukan bantuan dari PNPM – MP P2KP serta rencana kegiatan yang memerlukan koordinasi dan dukungan pihak PEMERINTAH DAERAH :

**1. Rencana Kegiatan Pronangkis**

No.	Kegiatan Masyarakat	Volume	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya (Rp)	Jumlah (Orang)	
						Tenaga kerja	Penerima manfaat
<b>A. BIDANG LINGKUNGAN</b>							
1	Sanitasi dan kebutuhan dasar warga	79 unit	RW. 1, 2, 3	Januari 2012 s.d. Des-14	212.400.000	450 orang (150 orang per RW)	+ 400 orang
2	Sarana penanganan banjir	500 m <sup>2</sup>	RW. 3	Januari 2012 s.d. Des-14	450.000.000	30 orang (15 orang per RW)	± 400 orang
3	Drainase	4.885 m	RW. 1, 2, 3	Januari 2012 s.d. Des-14	207.800.000	30 orang (20 orang per RW)	+ 100 KK
4	Jamban Kesehatan	6 unit	RW. 2, 3	Januari 2012 s.d. Des-14	10.500.000	7 orang	+ 100 orang
5	Pembuatan TPS	60 unit	RW. 3	Januari 2012 s.d. Des-14	90.000.000	2 orang	± 32 KK
6	Perumahan dan fasilitas umum	1 unit	RW. 1, 2, 3	Januari 2012 s.d.	48.500.000	30 orang	26 KK

				Des-14		(20 orang per RW)	
7	Jalan Lingkungan	1832.5 m	RW.1 - 3	Januari 2012 s.d. Des-14	139.500.000	90 orang (30 orang per RW)	3000 KK
8	Penerangan jalan umum	85 unit	RW. 2	Januari 2012 s.d. Des-14	10.500.000	1 orang	30 KK
9	Sarana air bersih	3 unit	RW. 1,3	Januari 2012 s.d. Des-14	10.500.000	3 orang	3 KK
10	Gorong-gorong	1 unit	RW. 3	Januari 2012 s.d. Des-14	500.000	1 orang	46 KK
11	Jalan Alternatif	200m <sup>2</sup>	RW. 3	Januari 2012 s.d. Des-14	6.500.000	30 orang	36 KK
12	Jembatan	2 unit	RW. 3	Januari 2012 s.d. Des-14	985.000.000	750 orang	3000 KK
<b>B</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>						
1	Santunan fakir miskin, Jompo, Yatim	3 kali	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	146.500.000	172 orang KK ✓	172 orang
2	Pendidikan	3 paket	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	3.000.000	12 anak	12 anak
3	Kesehatan	3 paket	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	7.700.000	12orang	302 jiwa
4	Penguatan Komunitas	3 paket	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	17.665.000	25 orang	360 orang
5	Penguatan kapasitas hidup warmis	12 paket	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	70.000.000	30 orang	184 KK
<b>C</b>	<b>BIDANG EKONOMI</b>						
1	Penguatan daya beli	1 paket	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	131.250.000	20orang	184 KK
2	Penguatan usaha warmis	1 paket	1 Desa	Januari 2012 s.d. Des-14	741.600.000	30orang	184 KK



(  
Wakil Tim PP  
)

Di tetapkan di : Kedung Puji Desember 2011

(  
Budiyono  
Wakil BKM  
)

(  
ABUSO Leh.  
Relawan  
)